



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

ORIGINALITY REPORT

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Dian Fitriani Elita
Assignment title: Jurnal
Submission title: ALASAN AMERIKA SERIKAT MENGELU
File name: eJournal_Dian_Fitriani_Elita_-_160204!
File size: 197K
Page count: 12
Word count: 5,216
Character count: 33,447
Submission date: 31-Oct-2023 12:45PM (UTC-07:00)
Submission ID: 2189789679

21%

SIMILARITY INDEX

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Rina Juwita, S.P., MHRIR
NIP.198104172005012001

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. No., (2023)

ISSN:

ALASAN AMERIKA SERIKAT MENGELUARKAN HONG KONG AUTONOMY ACT 2020 DALAM MERESPON UU KEAMANAN NASIONAL DI HONG KONG TAHUN 2020

Dian Fitriani Elita¹

Abstract: In 2020, United States passed Hong Kong Autonomy Act 2020 as a response to Hong Kong National Security Law 2020 released by Chinese Government. Therefore this research aim to explain why the United States issued the Hong Kong Autonomy Act 2020 in response to the passage of the Hong Kong National Security Act 2020. The type of research used in this research is exploratory with secondary data. The researcher used a qualitative research method in this research. As an analytical tool, this study uses the Decision Making Process Theory by Richard Charlton Snyder where the results of the research shows that US decisions are influenced by internal and external factors. Internal factors include the law is contrary to the democratic values of the United States, the US Senate is urging the passage of this law, and there are concerns from US business people in Hong Kong while external factors The Government of the People's Republic of China passed the Hong Kong National Security Act, and there is pressure from the people of Hong Kong to ask for help from the United States.

Keywords: Hong Kong Autonomy Act, United States, Hong Kong National Security Act, Extradition Bill.

Pendahuluan

Pasca berada di bawah kekuasaan Inggris akibat kekalahan pemerintah China dalam Perang Opium maka pada tanggal 01 Juli 1997, wilayah Hong Kong secara resmi dikembalikan oleh pemerintah Inggris kepada pemerintah China setelah kurang lebih 156 tahun berada dibawah kontrol Inggris dengan kesepakatan untuk menerapkan kebijakan "one country two system" untuk Hong Kong demi menjaga sistem kapitalis yang telah di terapkan di Hong Kong. Pasca pengembalian ini wilayah Hong Kong secara resmi memiliki status sebagai *Special Administrative Region (SAR)* dibawah kekuasaan pemerintah China (Iswara, 2020).

Dengan adanya status SAR untuk Hong Kong, maka wilayah ini berhak menikmati sistem pemerintahan yang berbeda dan hak otonomi yang lebih luas dari pemerintah China. Hal tersebut juga membuat Hong Kong memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur urusan internalnya seperti di bidang ekonomi dan hubungan budaya, termasuk di dalamnya memiliki otoritas mengenai hubungan luar negeri, perdagangan, mata uang, bea cukai, dan imigrasi.

Namun di lain sisi pemerintah China tetap memiliki hak untuk campur tangan atau terlibat dalam permasalahan yang terjadi di Hong Kong ketika hal itu menyangkut masalah pertahanan dan keamanan. Hak ini kemudian diterapkan oleh pemerintah China dalam penanganan demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Hong Kong pada tahun 2019 akibat adanya pembahasan mengenai RUU ekstradisi yang kemudian membuat pemerintah China pada tahun 2020 mengesahkan UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong (Sebayang, 2020).

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
an, E-mail: dianfitrianelita@gmail.com